

# REVITALISASI PENGAJARAN SEJARAH DAN UPAYA MENUJU PROFESIONALISME GURU-GURU SEJARAH

Soebijantoro  
FPIPS IKIP PGRI Madiun

## Abstract :

Teaching of history is one out of that of other subjects in schools, which activity includes the implementation of nurturing societal values from one generation to another. Nurturing societal values to students in class can in turn empower their awareness of the past through a systematic learning design. Teachers of history should consequently understand their duty – not only carrying out the proper instructional design, but also nurturing those societal values to students. That duty can only be realized by developing both instructional strategy and value acquisition, so as to contribute as professional history teachers who implement the *long life education*.

**Key words :** revitalization, teachers' professionalism

## A. PENDAHULUAN

Berbicara soal sejarah, orang sering berpikir bahwa hal ini merupakan urusan sekelompok kecil anggota masyarakat yang disebut sejarawan, peminat sejarah dan sejarawan pendidik. Pendidikan Sejarah sering dianggap sebagai urusan guru sejarah saja. Dengan kenyataan seperti inilah maka ada yang terlupakan bahwa sejarah merupakan urusan kita semua, seluruh bangsa Indonesia (Soedjatmiko, 1986:27).

Kekurangan pengertian di atas, bahkan sering ditunjukkan oleh guru sejarah itu sendiri. Guru sejarah kurang menyadari perannya dalam membina pelajaran sejarah. Hal ini tercemin dari kenyataan seringnya pengajaran di sekolah mendapat sorotan tajam dari masyarakat, karena ternyata pelajaran sejarah diselenggarakan dengan cara-cara yang kurang memadai (Widja, 1988:34). Mata pelajaran sejarah sering dikatakan sebagai mata pelajaran yang gampang dibaca semalam suntuk untuk keperluan ujian serta diragukan kebenarannya (Djoko Suryo, 1988:10).

Sementara itu pada saat ini sering dijumpai sinyalemen mengenai mengendornya semangat kebangsaan dan jiwa patriotisme, terutama pada kalangan generasi muda, yang dianggap rawan bagi upaya mewujudkan ketahanan bangsa Indonesia yang tengah membangun dan menghadapi masa depan yang makin dinamis. Hal ini tidak terlepas pula dari kondisi pengajaran sejarah di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh keadaan dan perkembangan politik nasional dan bahkan diintervensi oleh pelbagai kepentingan politik, sehingga sering menimbulkan persoalan rekonstruksi dan dekonstruksi terhadap penulisan sejarah di Indonesia. Salah satu contoh diantaranya ialah pada saat komisi X DPR dalam rapat dengar pendapat dengan Mendiknas tanggal 17 Juni 2005 yang meminta Mendiknas agar menanggihkan pemakaian materi mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 2004 (MT.Arifin, 2005:1). Dengan demikian tidak mengherankan apabila pengajaran sejarah di Indonesia akan memunculkan permasalahan mulai dari materi pelajaran, kualifikasi guru hingga metode pengajaran yang dipakai.

Apabila diamati dari segi pembangunan bangsa, maka pengajaran sejarah penting diberikan di sekolah-sekolah. Pernyataan ini mengacu pada pentingnya hubungan antara sejarah dengan pendidikan. Secara lebih khusus pendidikan pada dasarnya memiliki ide-ide pokok yaitu usaha pengembangan daya-daya manusia agar dengan pendidikan manusia dapat membangun dirinya dan bersama dengan sesamanya membudayakan lamanya dan membangun masyarakatnya (Ali Moertopo, 1978:34). Rumusan ini apabila di kaji secara mendalam akan mencerminkan unsur pokok dari proses dasar kehidupan sosial manusia yaitu proses sosialisai dan inkulturasi. Proses ini berupa pewarisan dan penuturan nilai-nilai sosial kultural pada individu-individu sebagai anggota kelompok. Dengan kata lain nilai-nilai yang

berkembang pada generasi muda terdahulu perlu diwariskan kepada generasi masa kini, bukan saja untuk integrasi individu ke dalam kelompok tetapi juga sebagai bekal kekuatan untuk menghadapi masa kini dan masa yang akan datang. Lebih-lebih apabila disadari bahwa tujuan pendidikan nasional pada dasarnya adalah ingin mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan motivasi yang kuat sebagai faktor penggerak dari dalam diri manusia itu sendiri yaitu nilai-nilai yang kalau dikaitkan dengan sejarah merupakan nilai masa lampau yang telah teruji oleh jaman.

Dengan demikian apabila pendidikan dianggap sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional, maka sejarah pada hakekatnya merupakan sumber kekuatan bagi sarana tersebut secara efektif. Untuk dapat menumbuhkan jiwa patriot dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan spesial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai para pahlawan serta berorientasi ke masa depan, maka pengajaran sejarah mempunyai fungsi yang sangat fundamental.

Sinyalemen-sinyalemen tersebut di atas menunjukkan bahwa mata pelajaran sejarah sering dikatakan sebagai mata pelajaran yang membosankan bahkan tidak memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Oleh karena pelaksanaan pembelajaran sejarah berkaitan dengan berbagai macam aspek, maka pendekatan yang dipergunakan adalah bersifat holistic. Salah satu sisi tersebut adalah bagaimana dengan pelaksanaan pengajaran sejarah di sekolah saat ini. Berangkat dari hal tersebut penulis berupaya untuk memberikan sumbang saran pemikiran revitalisasi apa saja yang perlunya kita lakukan untuk mewujudkan kembali tujuan pengajaran sejarah di sekolah khususnya di Sekolah Menengah Atas (SMA) saat ini sebab dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi tujuan pengajaran sejarah adalah agar siswa memperoleh kemampuan berpikir historis dan mampu mengembangkan kompetensi berpikir kronologis. Dengan demikian berangkat dari tingkat psikologi yang dimilikinya, seorang siswa SMA mampu untuk mengembangkan daya kreatifitas serta kritis terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Untuk itu dalam pengajaran sejarah, seorang guru dituntut untuk senantiasa merevitalisasi pengajaran yang telah dilakukan yang di-pergunakan untuk memenuhi tuntutan dari tujuan pengajaran sejarah tersebut.

## **B. AKTUALISASI PENGAJARAN DAN PENDIDIKAN**

Menurut Joko Suryo (1991:11) disebutkan bahwa pengajaran sejarah merupakan aktualisasi dua unsur yaitu pengajaran dan pendidikan. Dalam unsur pengajaran terdapat aktifitas yang berisi instruksi dan pendidikan intelektual, sedangkan dalam unsure pendidikan terdapat aktifitas yang berisi tentang muatan moral bangsa dan *civil society* yang demokratis dan bertanggung jawab kepada masa depan bangsanya. Terkait dengan unsur pengajaran tersebut, CP. Hill mengatakan bahwa dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran sejarah terdapat dua komponen yang berpengaruh bagi keberhasilan siswa yaitu komponen guru dan komponen subyek belajar (siswa) (1956:35). Hal ini berarti bahwa guru berperan sebagai pemimpin yang bertugas mengorganisir dan mempengaruhi perilaku tertentu sehingga terjadi proses belajar mengajar sejarah yang dapat mengkondisikan agar siswa tetap mempunyai hubungan yang hidup dengan mata pelajaran itu sendiri. Dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi ditegaskan bahwa materi pengajaran sejarah tertuang dalam kompetensi dasar, indikator dan materi pokok pada setiap kelas dan semester yang dapat dijabarkan di dalam pengembangan silabus (Nurhadi.2005:32). Oleh karena tujuan pengajaran sejarah di SMA adalah memperoleh kemampuan berpikir historis dan pemahaman sejarah maka aktualisasi unsur pengajaran dalam mata pelajaran sejarah adalah kemampuan guru dalam menguasai materi 1) Pengantar ilmu sejarah; 2) Kehidupan paling awal masyarakat di Indonesia; 3) Naik turunnya pengaruh tradisi Hindhu Budha di Indonesia; 4) Perkembangan awal tradisi Islam di Indonesi; 5) perkembangan pengaruh barat dan perubahan masyarakat di Indonesia pada masa colonial; 6) Muncul dan

berkembangnya pergerakan nasional Indonesia; 7) Interaksi Indonesia Jepang dan keadaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang; 8) Perkembangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan; 9) Perubahan di Indonesia di tengah usaha mengisi kemerdekaan ; 10) Jatuhnya orde baru dan reformasi; 11) Perkembangan dunia internasional setelah PD II dan pengaruhnya terhadap Indonesia; 12) Peristiwa mutakhir dunia dan globalisasi; 13) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut tersebut tidak hanya menuntut seorang guru menguasai materi yang berangkat dari buku teks saja, akan tetapi aktualisasinya harus lebih dari itu bagaimana dapat menemukan sumber belajar yang lain.

Obyek sejarah terkait dengan kompleksitas aktivitas manusia, sehingga menuntut kreatifitas guru sejarah menemukan lebih banyak sumber belajar guna melengkapi atau memenuhi keinginan dari tujuan pembelajaran sejarah khususnya di SMA. Disamping penguasaan materi beserta penemuan sumber belajar, seorang guru dituntut pula untuk dapat memakai metode pengajaran yang akan dipakai. Terkait dengan hal itu I Gde Wija mengatakan bahwa keberhasilan proses pengajaran sejarah adalah tersedianya metode yang dipakai dalam artian bahwa bagaimana model mengajar diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai (1989:37). Apabila dikaitkan dengan model pengajaran sejarah yang diberlakukan di sekolah baik pada tingkat dasar hingga menengah, maka model tersebut dapat berbentuk model garis besar kronologis, model tematis., model garis perkembangan khusus dan model regresif (1989:45). Dengan demikian pelaksanaan suatu model dimungkinkan dapat ditopang dengan berbagai metode baik ceramah, diskusi, metode pelaksanaan tugas maupun variasi dari berbagai metode yang dipandang efektif dalam menunjang model yang diinginkan guru sejarah. Hal ini berarti aktualisasi yang diharapkan adalah kemampuan guru untuk melakukan interelasi metode dengan materi pengajaran yang akan disampaikan atau diberikan dalam proses belajar mengajar.

Aktualisasi kedua dalam pengajaran sejarah adalah unsur pendidikan. Apabila dalam unsur pendidikan sejarah terdapat aktifitas yang berisi tentang muatan moral bangsa dan *civil society* yang demokratis dan bertanggung jawab kepada masa depan bangsanya, maka hal ini harus dikaitkan dengan tujuan pengajaran sejarah di sekolah yaitu membangun kepribadian dan sikap mental anak didik serta meningkatkan kesadaran akan suatu dimensi yang sangat fundamental dalam eksistensi kehidupan manusia yaitu kontinuitas gerak dan peralihan secara terus menerus dalam perjalanan sejarah bangsa kepada anak didik serta menanamkan nilai-nilai cinta tanah air (Van der Meulen.1972:14). Terkait dengan hal itu Sartono Kartodirjo mengatakan bahwa dalam pembangunan suatu bangsa pengajaran sejarah mempunyai peran untuk menyadarkan anak didik dan membangkitkan kesadaran sejarah yang secara sadar melihat bahwa dirinya berada dalam proses tersebut (1988:20). Bahkan I Gde Wija menegaskan bahwa apabila dikaitkan dengan tujuan pengajaran sejarah, maka salah satu aspek yang harus dipahami oleh siswa adalah aspek pengetahuan. Artinya seorang siswa harus menguasai pengetahuan tentang fakta –fakta khusus (unik) dari peristiwa masa lampau sesuai dengan waktu, tempat serta kondisi pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Tidak hanya itu saja siswa harus mampu menguasai pengetahuan tentang unsur-unsur umum (generalisasi) yang terlihat pada sejumlah peristiwa masa lampau. (1989:22). Hal ini tentunya menunjukkan bahwa kemungkinan untuk mewujudkan kemampuan generasi muda dalam upaya merekonstruksi sejarah Indonesia akan terbuka sehingga pemahaman bahwa untuk menerangkan keadaan masyarakat sekarang ini tidak lepas dari upaya pengungkapan perkembangan historis dari berbagai unsur atau elemen masyarakat dengan keunikan-keunikannya (Sartono Kartodirjo. 1982:4)

Fakta sosial menunjukkan bahwa interaksi social akan menunjukkan adanya benturan serta perbedaan kepentingan. Hal ini terjadi karena masyarakat memiliki nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang mewujudkan akan kebutuhan umum dan bersama dengan akibat masyarakat akan membentuk suatu kesatuan hidup

dan didalamnya akan berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa identitas bersama. Aktualisasi pendidikan dalam pengajaran sejarah oleh guru sejarah khususnya di Indonesia adalah bagaimana seorang guru sejarah mampu menunjukkan fakta afektif yaitu adanya nilai/value dalam materi pelajaran sejarah yang dapat menumbuhkan kesadaran sejarah agar mereka mampu untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan perkembangan jaman, tidak hanya itu saja siswa diharapkan dapat menghargai berbagai aspek kehidupan masa kini dari masyarakat dimana mereka dapat hidup sebagai bagian hasil pertumbuhan masa lampau. Dalam hal ini Van der Meulen berpendapat bahwa sejarah dapat membangkitkan keinsyafan akan suatu yang sangat fundamental dalam eksistensi umat manusia, dimana dasar dari eksistensi tersebut adalah kontinuitas yaitu gerakandan peralihan terus menerus dari masa lampau ke masa kini. Artinya bahwa manusia akan tetap ada apabila bergerak ke depan (1980:7).

### **C. PROFESIONALISME GURU, HARAPAN DAN TAN-TANGAN**

Pada saat ini wacana tentang sertifikasi guru dan berbagai persoalan yang terkait dengannya ramai dibicarakan bukan hanya di kalangan guru itu sendiri tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Hal ini tidak mengherankan sebab salah satu muara yang dituju adalah terciptanya profesionalisme guru itu sendiri. Penerbitan Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menuntut kualifikasi guru minimal berpendidikan D4/S1. Hal ini membuat para guru yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang itu mulai berlomba mencari gelar sarjana. Sehingga keinginan untuk dapat mengikuti sertifikasi menjadi semacam obsesi. Seperti diketahui bahwa sampai awal 2008 tidak satu pun guru di Indonesia yang memegang sertifikat pendidik. Padahal terdapat sekitar 2,7 juta guru di Indonesia. Mereka membayangkan jika lulus dan mendapat sertifikat pendidik, selain menerima tunjangan fungsional, mereka pun dijanjikan menerima tunjangan profesi yang besarnya satu kali gaji pokok. Oleh sebab itu seringkali terjadi para guru lebih terfokus kepada konsekuensi finansial dari sertifikasi daripada idealisme yang ada di balik program sertifikasi itu sendiri. Di samping itu, banyak pula yang mengkhawatirkan bahwa kondisi ini akan digunakan oleh LPTK (Lembaga Pendidikan dan Teknologi Keguruan), termasuk universitas-universitas eks IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan), melakukan sertifikasi massal dengan pendekatan proyek. Jika hal itu terjadi maka sertifikasi itu tidak akan banyak memberikan manfaat positif bagi peningkatan profesionalisme guru. Ujung-ujungnya, negara dan rakyat yang akan dirugikan karena sudah mengeluarkan ongkos yang besar untuk melaksanakan program itu. Jika disimak secara mendalam maka landasan filosofis di balik penerapan program sertifikasi guru itu adalah untuk peningkatan profesionalisme guru. UU Guru dan Dosen pada hakekatnya ingin memberdayakan profesi guru melalui kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Persoalan ini bukan hanya dihadapi oleh guru-guru sekolah dasar yang merupakan lulusan SPG (Sekolah Pendidikan Guru) atau pun program diploma pada fakultas keguruan, tetapi juga dihadapi oleh para guru sejarah di tingkat SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), dan bahkan mata pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) di sekolah dasar. Dalam konteks itu perlu dicari solusi untuk mengatasi persoalan ini. Program itu seharusnya bukan hanya berkutat pada kualifikasi dan sertifikasi guru yang lebih bersifat formalitas, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru sejarah setelah yang bersangkutan mendapatkan sertifikat

Hal tersebut di atas didasari oleh asumsi bahwa sertifikasi lebih banyak berkaitan dengan persoalan paedagogis daripada persoalan kompetensi dan profesionalisme di bidang substansi ilmu yang akan ditransfer ke peserta didik. Sertifikasi guru adalah proses perolehan sertifikat pendidik bagi guru. Sertifikat pendidik bagi guru berlaku sepanjang yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat pendidik ditandai

dengan satu nomor registrasi guru yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Sertifikasi diperoleh melalui pendidikan profesi yang diakhiri dengan uji kompetensi. Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 kompetensi guru meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

Kompetensi paedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia. Kompetensi Sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Adapun kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya. Kompetensi ini disebut pula dengan penguasaan sumber bahan ajar atau bidang studi keahlian. Kompetensi itu merupakan satu kesatuan yang utuh, dan kompetensi profesional sebenarnya merupakan “payung”, karena telah mencakup kompetensi lainnya. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan memenuhi persyaratan dapat disertifikasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Sertifikasi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi atau ditunjuk pemerintah. Setelah disertifikasi guru akan memperoleh sertifikat pendidik, yaitu bukti formal sebagai pengakuan yang akan diberikan kepada guru sebagai tenaga yang professional. Dengan memiliki sertifikat pendidik, guru akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum, meliputi: gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sementara guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Undang-undang Nomor 14/ 2005 memberi angin segar kepada guru, karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan karier dan mendapatkan penghargaan yang sepatutnya. Undang-undang itu akan dapat mengangkat harkat dan martabat guru yang memiliki kedudukan dan peranan strategis dalam pembangunan nasional, yang sebelum adanya undang-undang tersebut tampak kurang mendapat perhatian. Untuk memperoleh sertifikat pendidik tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan memerlukan kerja keras para guru. Sertifikat pendidik akan dapat diperoleh guru apabila mereka benar-benar memiliki kompetensi dan profesionalisme. Bagi para guru yang memiliki kompetensi dan profesionalisme, hal ini mungkin bukan merupakan persoalan yang pelik, melainkan tinggal menunggu waktu. Sebaliknya, para guru yang kurang memiliki kompetensi dan profesionalisme, hal ini dapat menjadi sebuah persoalan yang pelik ketika giliran untuk disertifikasi telah tiba. Berkaitan dengan hal itu, guru harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk disertifikasi, agar kesempatan yang baik itu tidak hilang begitu saja karena tidak adanya persiapan yang memadai. Artinya diperlukan kesiapan mental, keilmuan, dan finansial. Dalam kaitan dengan persiapan khususnya bidang keilmuan, guru perlu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme-nya. Untuk kepentingan sertifikasi dan penjaminan mutu pendidikan perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru sejarah. Hal ini perlu dipahami karena pascasertifikasi guru sejarah harus tetap meningkatkan kemampuan dan

profesionalismenya agar mutu pendidikan tetap terjamin. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru sejarah dapat dilakukan dengan beberapa cara antara dengan 1) Studi Lanjut artinya guru sejarah dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui peningkatan jenjang pendidikan. Terdapat kecenderungan para guru lebih suka untuk mengikuti program ilmu pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan guru dapat menambah pengetahuan tentang ilmu sejarah dengan mengikuti program pendidikan ilmu sejarah guna melengkapi pengetahuan dan kemampuannya dalam bidang kesejarahan; 2) Kursus dan Pelatihan artinya diperlukan keikutsertaan dalam kursus dan pelatihan tentang kesejarahan dan kependidikan. Walaupun tugas utama seorang guru adalah mengajar, namun tidak ada salahnya apabila dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya perlu dilengkapi dengan kemampuan meneliti dan menulis artikel/ buku. Oleh karena itu, guru-guru sejarah perlu juga mengikuti kursus atau pelatihan tentang Teori dan Metodologi Sejarah, penelitian sejarah lokal, dan penulisan artikel ilmiah. Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan semacam itu, guru dapat mengetahui dan mempraktikkan penelitian sejarah dan menuliskannya dalam bentuk laporan dan artikel yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik ilmiah maupun administratif yang berkaitan dengan profesinya sebagai guru; 3) Pemanfaatan Jurnal. Jurnal yang diterbitkan oleh masyarakat profesi atau perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Artikel-artikel di dalam jurnal biasanya berisi tentang perkembangan terkini suatu disiplin tertentu. Dengan demikian, jurnal dapat digunakan untuk memutakhirkan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru. Dengan memiliki bekal ilmu pengetahuan yang memadai guru dapat mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik. Selain itu, jurnal-jurnal itu dapat dijadikan sebagai media untuk mengomunikasikan tulisan hasil pemikiran dan penelitian guru yang dapat digunakan untuk mendapatkan angka kredit yang dibutuhkan pada saat sertifikasi dan kenaikan pangkat. Terdapat beberapa jurnal yang dapat diakses oleh para guru sejarah, seperti *Sejarah* (Masyarakat Sejarawan Indonesia Pusat), *Citra Lekha* (Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Tengah), *Paramitha* (Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang), *Lembaran Sejarah* (Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada), dan *Historia* (Universitas Pendidikan Indonesia). Jurnal *Sejarah* dan *Lembaran Sejarah* tampaknya lebih mengkhususkan pada bidang sejarah murni (ilmu sejarah), sedangkan *Citra Lekha*, *Paramitha*, dan *Humaniora* selain sejarah murni (ilmu sejarah) juga memuat artikel-artikel sejarah terapan (pendidikan sejarah). Permasalahan yang sering penulis jumpai adalah tidak sepenuhnya baik dosen maupun guru dalam memahami format penulisan dalam sebuah jurnal, sehingga diperlukan upaya-upaya dalam bentuk seminar atau lokakarya penulisan karya ilmiah khususnya dikalangan guru. 4) Seminar. Keterlibatan guru sejarah dalam seminar merupakan alternatif yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru sejarah. Seminar sampai saat ini masih dilihat sebagai cara yang paling diminati dan sedang menjadi *trend* para guru dalam era sertifikasi, karena dapat menjadi sarana untuk mendapatkan angka kredit. Melalui seminar tentang sejarah dan pendidikan sejarah, guru mendapatkan informasi-informasi “baru” yang berkaitan dengan ilmu sejarah dan pendidikan sejarah. Cara itu sah dan baik untuk dilakukan. Namun demikian, di masa-masa yang akan datang akan lebih baik apabila guru tidak hanya menjadi peserta seminar saja, tetapi lebih dari itu dapat menjadi penyelenggara dan pemakalah dalam acara seminar. Forum seminar yang diselenggarakan oleh dan untuk guru dapat menjadi wahana yang baik untuk mengomunikasikan berbagai hal yang menyangkut bidang ilmu dan profesinya sebagai guru sejarah. 5) Kerja Sama dengan Lembaga Profesi (Masyarakat Sejarawan Indonesia dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah). Kerjasama yang terjalin merupakan upaya untuk merealisasikan beberapa

cara sebelumnya antara lain bekerja sama dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Sejarah untuk menyelenggarakan kegiatan seminar dan lokakarya. Langkah-langkah semacam ini perlu ditempuh dalam suatu jalinan kerja sama atau koordinasi yang lebih kuat. Untuk merealisasikan hal ini, perlu didorong terbentuknya Masyarakat Sejarawan Indonesia di tingkat kabupaten (komisariat). Komisariat dapat menjadi inisiator dan fasilitator penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dapat digunakan sebagai wahana untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru sejarah, seperti diskusi rutin, seminar, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.

#### **D. PENUTUP**

Dalam bagian ini penulis bermaksud untuk menggarisbawahi persoalan-persoalan mendasar yang perlu untuk dipahami dan direnungkan bersama. bahwa pengajaran sejarah di sekolah tidak bertujuan untuk menciptakan seseorang sebagai ahli sejarah, walaupun diharapkan ada beberapa siswa yang dapat mengembangkan karier sebagai sejarawan, namun secara keseluruhan pengajaran sejarah bertujuan untuk membangun kepribadian dan sikap mental anak didik serta meningkatkan kesadaran akan suatu dimensi yang sangat fundamental dalam eksistensi kehidupan manusia. Dalam pembangunan suatu bangsa pengajaran sejarah ditekankan untuk menyadarkan anak didik dan membangkitkan kesadaran sejarahnya artinya terdapat bahwa manusia berada dalam proses sejarahnya sendiri.

Pengajaran sejarah di sekolah tidak lepas dari peran guru sejarah. Kebijakan pemerintah tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, dan kesejahteraan guru yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran. Sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru hendaknya tidak dilihat sebagai suatu formalitas untuk mendapatkan sertifikat pendidik yang berimplikasi pada kenaikan gaji guru. Akan tetapi di terkandung suatu tanggung jawab bahwa guru harus selalu meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Dengan sertifikasi guru tidak akan menjadi pribadi yang paling berkompeten, paling tahu, dan paling benar, akan tetapi dituntut untuk selalu dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Sebagai pendidik, sudah seharusnya guru harus belajar seumur hidup (*long life education*). Oleh karena itu, guru harus membangun dan mengembangkan dirinya, sehingga dia mampu menjadi pencetus “teori-teori” baru dalam konteks pembelajarannya untuk peningkatan mutu pendidikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Soedjatmiko. 1986. *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- MT Arifin. “ Paradigma Sejarah di Indoensia dan Kurikulum Sejarah” (*MakalahSeminar nasional dan Temu Alumni*) PPS UNS, 26-27 Agustus 2005
- Ali Murtopo.1978. *Strategi Kebudayaan*. Jaarta. CSIS
- Djoko Suryo. 1988. “ Serba serbi Pengajaran Sejarah Pada Masa Kini” Dalam Dalam *Historika* No. 6 Hal 9-15. Surakarta: PPS IKIP Jakarta, KPK Universitas Sebelas Maret
- 1991. “Pengajaran Sejarah dan Globalisasi Kehidupan” (Makalah Seminar Pengajaran Sejarah dan Perubahan Sosial) IKIP Semarang 13 Maret 1991.

I Gde Widja. 1988. *Pengantar Ilmu Sejarah Dalam Perspektif Pendidikan*. Semarang: Satya Wacana

—————. 1989. *Dasar-dasar Pengembangan Strategi Serta Metode Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Depdikbud

Hill, CP. 1956. *Saran-saran Mengajarkan Sejarah*. Terjemahan Haksan Wira Sutisna. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian PP dan K

Nurhadi. 2005. *Kurikulum 2004*. Jakarta: Gramedia

Sartono kartodirjo. 1988. "Menggali Warisan Leluhur Untuk Memperkokoh Identitas Nasional" *Makalah Seminar*. PPS IKIP Jakarta

Van der Meulen. 1972. "Pengajaran Sejarah Dewasa Ini". Basis XXI. Edisi Mei 1972. Yogyakarta: Kanisius